



**PENETAPAN**

**Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Bandung Agung, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL WANDIDANG45@GMAIL.COM, sebagai Pemohon I;

**Dino Mitri binti Drahan alias Derahan**, tempat dan tanggal lahir Padang Pandan, 26 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email agelsyahputraagel@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.P/2023/PA.Mna yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Muhammad Vinargi bin Muhidin dengan seorang Perempuan yang bernama, Pita Loka binti Amri tempat tanggal lahir Manna, 09 Oktober 2005 (18 tahun 7 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Padang Lebar, Kecamatan Seginim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin baru berumur 18 tahun 11 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Muhammad Vinargi bin Muhidin dengan, Pita Loka binti Amri tidak dapat lagi di tunda pernikahan nya karena Pita Loka binti Amri telah hamil;
4. Bahwa, antara, Muhammad Vinargi bin Muhidin dengan, Pita Loka binti Amri tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara, Muhammad Vinargi bin Muhidin dengan Pita Loka binti Amri punya keinginan untuk menikah;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Muhammad Vinargi bin Muhidin dengan seorang Perempuan yang bernama, Pita Loka binti Amri yang berasal dari Desa Padang Lebar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak para Pemohon hamil 9 (sembilan) minggu dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian Hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin dan calon istri anak para Pemohon yang bernama Pita Loka binti Amri, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 11 bulan, sedangkan calon istri anak para Pemohon telah berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 6(enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama: Amri dan Tuti Herlina tempat kediaman di Desa Padang Lebar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selaku ayah/ibu kandung calon istri anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Pita Loka binti Amri adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pita Loka binti Amri berumur 18 tahun 7 bulan, sedangkan anak para Pemohon Muhammad Vinargi bin Muhidin masih berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pita Loka binti Amri dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 6(enam) bulan;
- Bahwa Pita Loka binti Amri dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini Pita Loka binti Amri sudah hamil 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa antara Pita Loka binti Amri dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pita Loka binti Amri telah siap hidup dan membina rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1701021010800002 tanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1701026603880001 tanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/06/IV/2004 tanggal 07 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701022905050001 tanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 4263/12/DP/BS/2005 tertanggal 19 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon 44/01/DP/BS/2009/2004 tertanggal 30 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/16/KEUR/PKMS/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/25/PKMS/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, dan hasil Usg telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Seginim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 304/Kua.07.01.4/PW.01/05/2023 tertanggal 09 Mei 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan, selaku Tetangga dari para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon Ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin dengan seorang perempuan bernama Pita Loka binti Amri;
  - Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat calon istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil 9 (sembilan) minggu;

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Lebar xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku Tetangga dari calon istri anak para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin dengan seorang perempuan bernama Pita Loka binti Amri;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat menurut para Pemohon calon istri anak para Pemohon saat sedang hamil 9 (sembilan) minggu;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil 9 (sembilan) minggu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin yang berusia 18 tahun 11 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Pita Loka binti Amri yang masih berusia 18 tahun 7 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.9 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka permohonan para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon, masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, dan di antara anak para Pemohon tersebut adalah Muhammad Vinargi bin Muhidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin, lahir tanggal 29 Mei 2005, yang berarti saat ini telah berumur 18 tahun 11 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon, terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama Pita Loka binti Amri, lahir tanggal 09 Oktober 2005, yang berarti saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bagi calon istri anak para Pemohon tersebut akan diperiksa secara tersendiri di Pengadilan Agama Manna sebagaimana ketentuan Pasal 8

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan Kehamilan terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta calon istri anak para Pemohon yang bernama Pita Loka binti Amri saat ini tengah hamil dan usia kehamilannya 9 (sembilan) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin, yang lahir tanggal 29 Mei 2005, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 11 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon Ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pita Loka binti Amri telah berumur 18 tahun 7 bulan, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak para Pemohon dengan calon istrinya telah pernah melakukan hubungan layaknya istri isteri yang sah dan saat ini calon istri anak para Pemohon telah 9 (sembilan) minggu;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon istrinya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin, yang lahir tanggal 29 Mei 2005, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 11 bulan dan calon istri anak para Pemohon yang bernama Pita Loka binti Amri, yang lahir tanggal 09 Oktober 2005, yang berarti calon istri anak para Pemohon telah berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah bahkan akibat hubungan tersebut calon istri anak para Pemohon sudah hamil 9 (sembilan) minggu, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh calon istri anak para Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak para Pemohon bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin untuk menikah dengan calon istri anak para Pemohon yang bernama Pita Loka binti Amri ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Muhammad Vinargi bin Muhidin dengan calon istrinya yang bernama Pita Loka binti Amri dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Muhammad Vinargi bin Muhidin)** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **(Pita Loka binti Amri)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan secara elektronik oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sopiah, SH

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Mna